

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Rajagrafindo Persada.
- Al Muchtar, Suwama. 2015. Dasar Penelitian Kualitatif. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.
- Arba, M. (2021). Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika.
- Arisaputra, M. I., & SH, M. K. (2021). Reforma agraria di Indonesia. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Boedi Harsono. (1997). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan.
- Bungin, Burhan. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Fajar, F. (2016). UPAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 6(2), 21-38.
- Gunawan, Imam. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harsono, Boedi. (2008). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.
- Haiyanta. 1997. Fungsi-Fungsi Pemerintahan. Jakarta: Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Dalam Negeri.
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Indonesia. 1985. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Jakarta.
- Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.

- Indonesia. 2011. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 60. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran RI Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 2043. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. (2011). Memahami Ilmu Pemerintahan: *Suatu Kajian Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Limbong, B. (2012) Hukum Agraria Nasional. Margaretha Pustaka
- Limbong, B. (2012) Konflik Pertanahan. Margaretha Pustaka.
- Miftah, Thoha. (2012). Kepemimpinan dalam Manajemen, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, Iwan dan Rochin Bahuri. (2004) Pembangunan Wilayah: Persepsi Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES
- Nurdin, M. (2018). Akar Konflik Pertanahan di Indonesia. Jurnal Hukum Positum, 3(2), 126-141.
- Ndraha, T. (2003). Kybernology (ilmu pemerintahan baru).
- Peraturan Bupati Wajo Nomor 164 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.
- Pragusnaedi, M. (2023). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Mafia Tanah Di Kabupaten Wajo (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).
- Rasyid, M. R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Mutiara Sumber Widya.
- Santoso, U. (2005). Hukum agraria hak-hak atas tanah.

- Sumardjono, Maria S.W. (2009). Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jakarta: Kompas.
- Sumardjono, M. S. (2006). Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi. Penerbit Buku Kompas.
- Wiradi, G. (2009). Seluk beluk masalah agraria: reforma agraria dan penelitian agraria. SAINS Press.
- Zuber, A. (2013). Konflik Agraria Di Indonesia. Jurnal Sosiologi Reflektif, 8(1), 147-158.
- Zulfikar, A. (2017). Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan. Lex Specialist, (21), 74-85.